

TILIK DATA

“Perubahan Konstitusi dan Masa Jabatan Kepala Pemerintahan”

Tim Analisis LAB 45

18 Agustus 2021

Ringkasan Eksekutif

Negara-negara dengan sistem republik presidensial cenderung melakukan perubahan atau amandemen pada konsstitusi mereka.

Perubahan konstitusional di 199 negara relatif berdampak cukup positif dengan perkembangan kehidupan demokrasi mereka.

Pembatasan masa jabatan kepala pemerintahan lazim diberlakukan di negara-negara yang mengadopsi sistem republik presidensial, yaitu maksimal dua periode dengan durasi 4-5 tahun.

Pembatasan masa jabatan tersebut cenderung memiliki hubungan korelasi yang lemah dengan perbaikan indeks-indeks demokratisasi.

LAB 45

mengumpulkan data terkait perubahan konstitusi dan pengaturan masa jabatan kepala negara/pemerintahan di 199 negara dengan menggunakan beberapa sumber referensi publik.

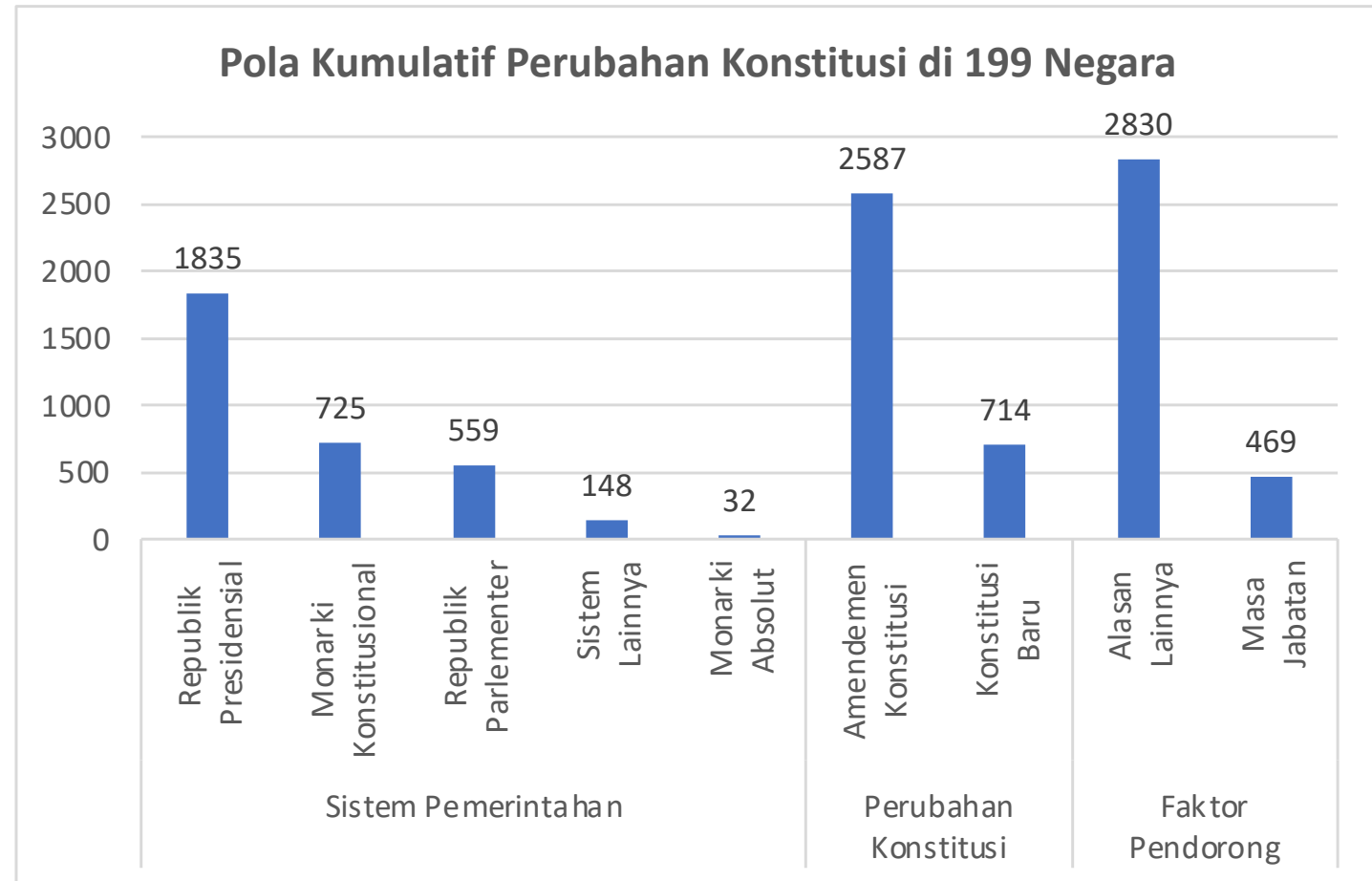
No.	Region	Country	Form of Government	Political Leadership				
				Title	Number of Term	Term Duration	RT Score	Notes
1	Africa	Algeria	Presidential Republic	President	Two	5-year	5	Since 2020 constitutional reform
2	Africa	Angola	Presidential Republic	President	Two	5-year	5	Since 2010 constitutional reform
3	Africa	Benin	Presidential Republic	President	Two	5-year	5	Since 1990 Constitutional reform
4	Africa	Botswana	Parliamentary Republic	President	Two	5-year	5	
5	Africa	Burkina Faso	Presidential Republic	President	Two	5-year	5	
6	Africa	Burundi	Presidential Republic	President	Two	7-year	7	Since 2018 constitutional reform
7	Africa	Cabo Verde	Presidential Republic	President	Two	5-year	5	
7	Africa	Cabo Verde	Presidential Republic	Prime Minister	Infinite	Infinite	10	
8	Africa	Cameroon	Presidential Republic	President	Infinite	7-year	9	Since 2008 constitutional reform
9	Africa	Central African Republic	Presidential Republic	President	Two	5-year	5	
10	Africa	Chad	Presidential Republic	President	Two	6-year	6	Since 2018 constitution

No.	Region	Country	Forms of Government	New Constitution	In Force Constitutional Amend.	Change/ Amend. Factor	Incumbent Top Leadership	Incumbent Ruling Term
1	Africa	Algeria	Presidential Republic	1963		Others	President Ahmed Ben Bella	1st year, 1st term
2	Africa	Algeria	Presidential Republic	1976		Others	Colonel Houari Boumediene (Chairman of Revolutionary Council)	11th year, 1st term
3	Africa	Algeria	Presidential Republic		1979	Others	President Chadli Bendjedid	1st year, 1st term
4	Africa	Algeria	Presidential Republic		1980	Others	President Chadli Bendjedid	2nd year, 1st term
5	Africa	Algeria	Presidential Republic		1986	Others	President Chadli Bendjedid	3rd year, 2nd term
6	Africa	Algeria	Presidential Republic		1988	Others	President Chadli Bendjedid	1st year, 3rd term
7	Africa	Algeria	Presidential Republic	1989		Others	President Chadli Bendjedid	2nd year, 3rd term
8	Africa	Algeria	Presidential Republic		1992	Others	Chairman of the High Council of State, Mohamed Boudiaf	1st year, 1st term
9	Africa	Algeria	Presidential Republic	1996		Term Limit	President Liamine Zeroual	2nd year, 1st term
10	Africa	Algeria	Presidential Republic		2002	Others	President Abdelaziz Bouteflika	2nd year, 1st term

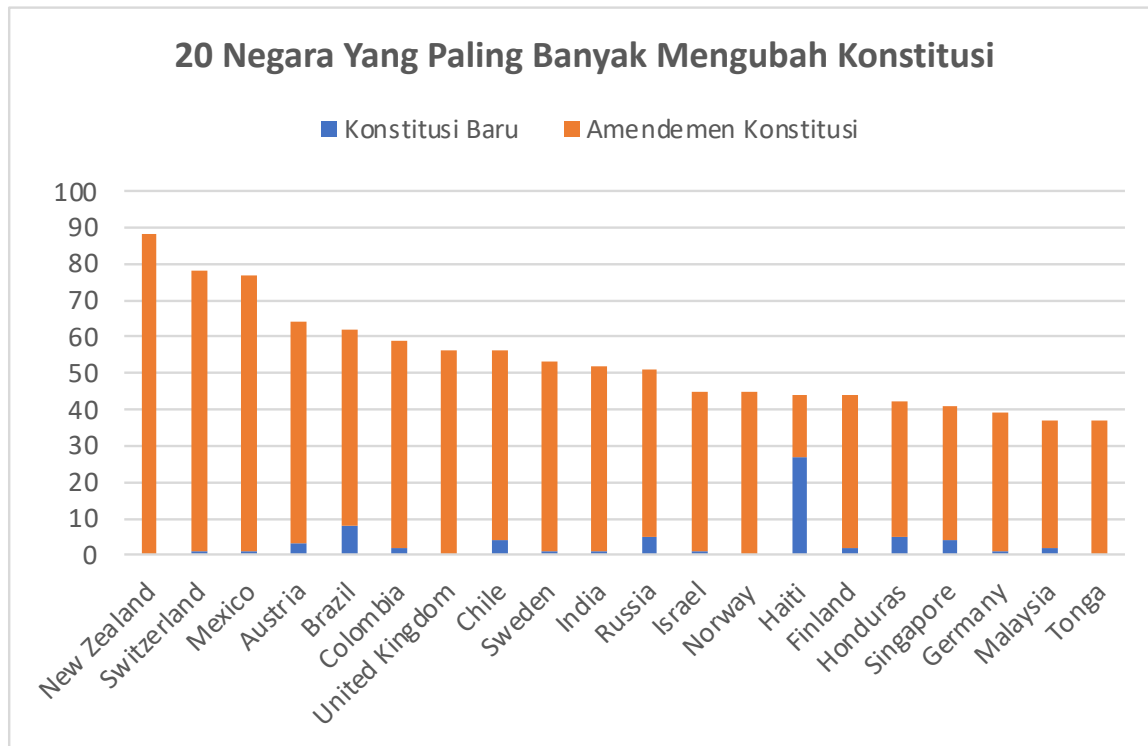
Temuan #1: sebagian besar (56%) perubahan konstitusi terjadi di negara dengan sistem republik presidensial.

Temuan #2: mayoritas (78%) perubahan tersebut berupa amandemen konstitusi yang berlaku.

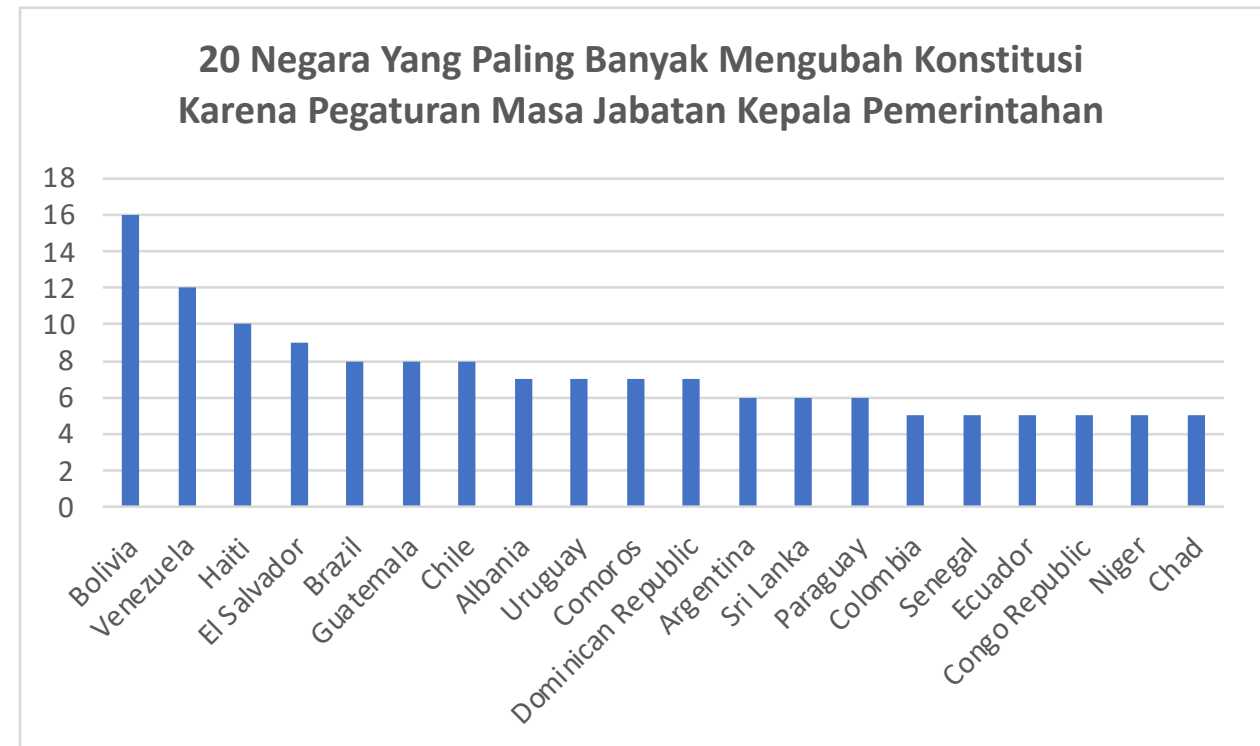
Temuan #3: hanya segelintir (14%) saja yang mengubah konstitusi karena pengaturan masa jabatan kepala pemerintahan.



Temuan #4: negara yang paling banyak tercatat mengamandemen undang-undang dasar adalah Selandia Baru.

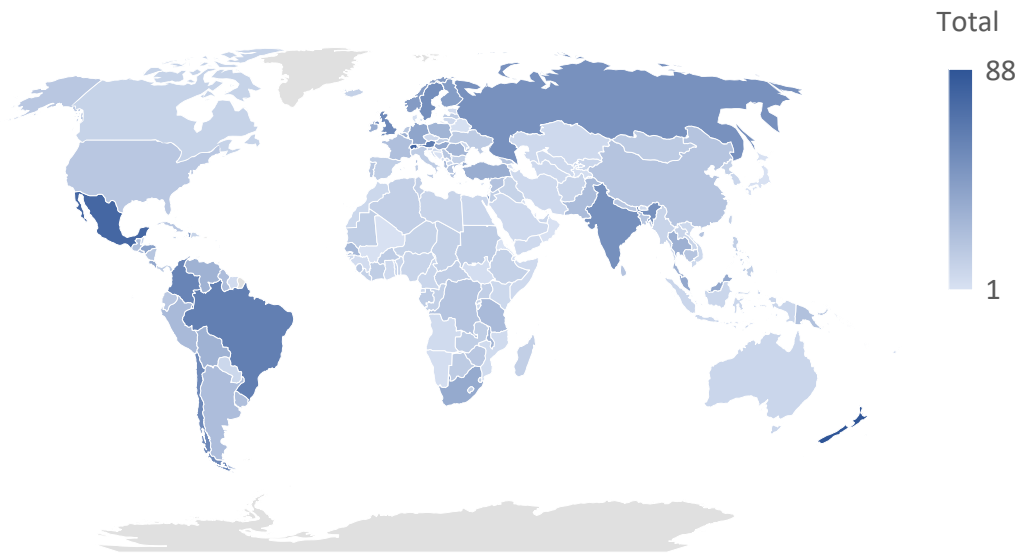


Temuan #5: perubahan konstitusi karena pengaturan masa jabatan kepala pemerintahan paling banyak terjadi di Bolivia.



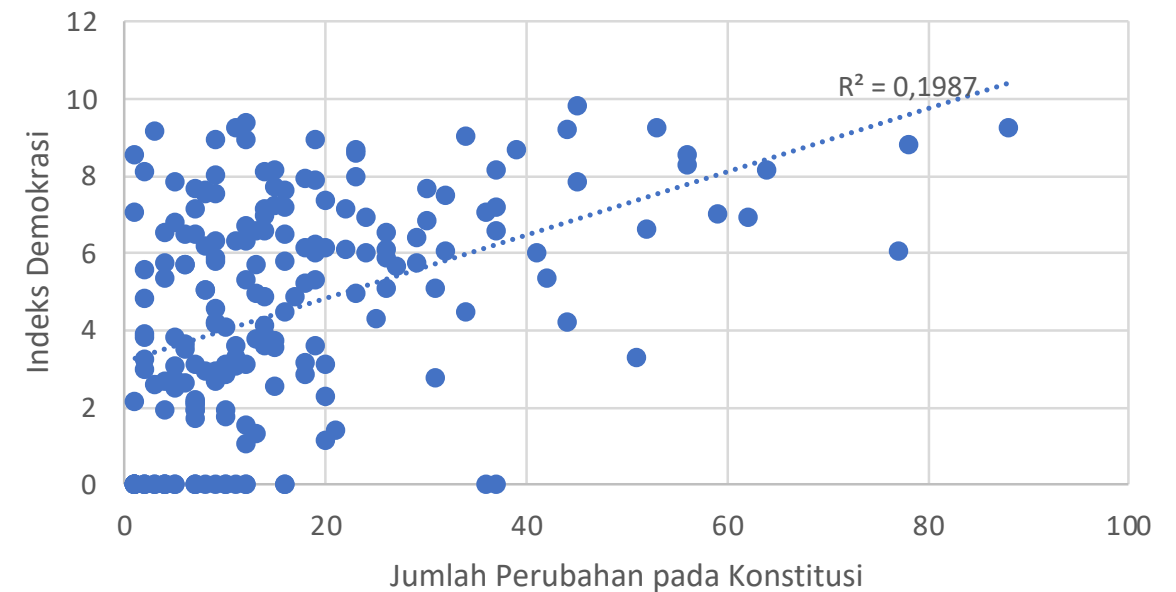
Temuan #6: jumlah perubahan pada konstitusi di 199 negara cenderung berkorelasi cukup positif dengan pembangunan demokrasi (2020) di dalam negerinya. Perubahan-perubahan tersebut dilakukan dengan mengadopsi pengaturan ketatanegaraan yang lebih demokratis.

Pola Sebaran Perubahan Konstitusi

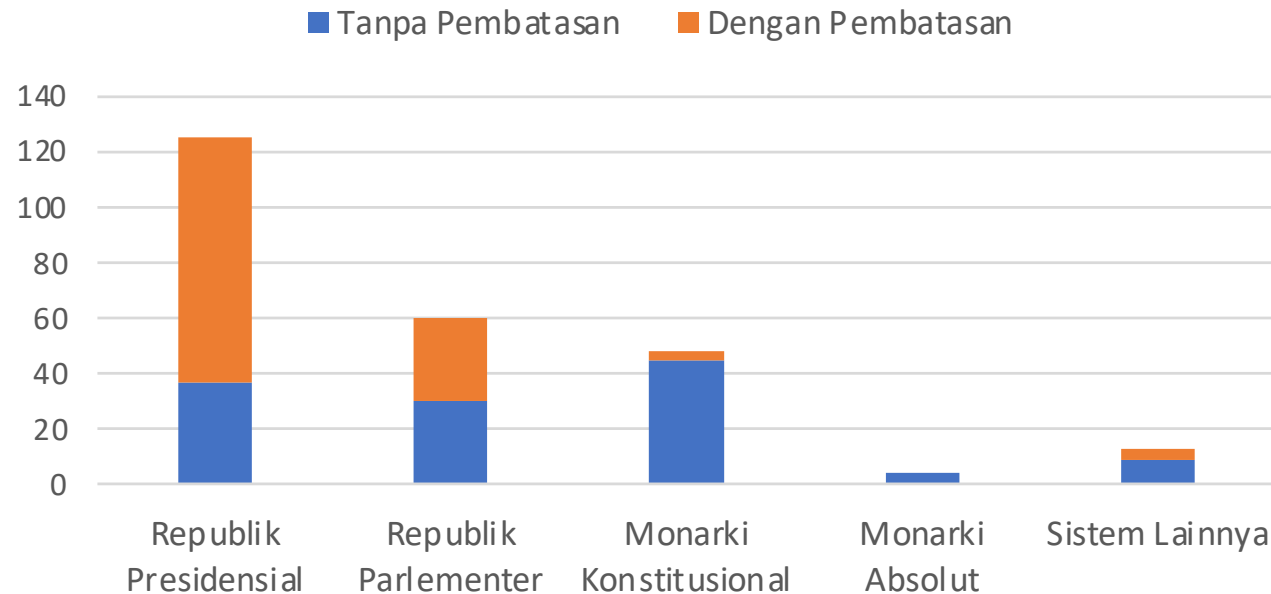


Powered by Bing
© Australian Bureau of Statistics, GeoNames, Microsoft, Navinfo, TomTom, Wikipedia

Perubahan Konstitusi dan Pembangunan Demokrasi

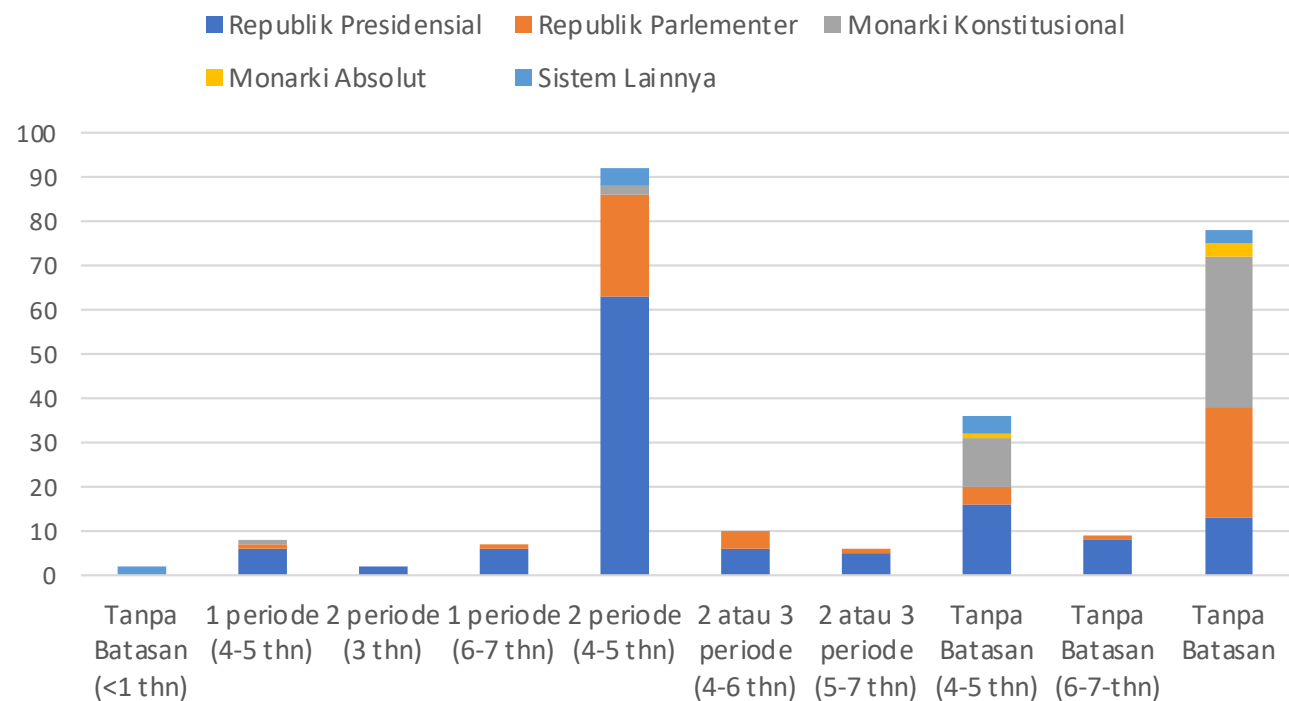


Pola Pengaturan Masa Jabatan Kepala Pemerintahan Menurut Sistem Tata Negara



Temuan #7: negara-negara yang menganut sistem republik presidensial umumnya membatasi periode jabatan kepala negaranya. Sebaliknya, tidak ada pembatasan periode jabatan kepala pemerintahan di hampir semua negara monarki konstitusional.

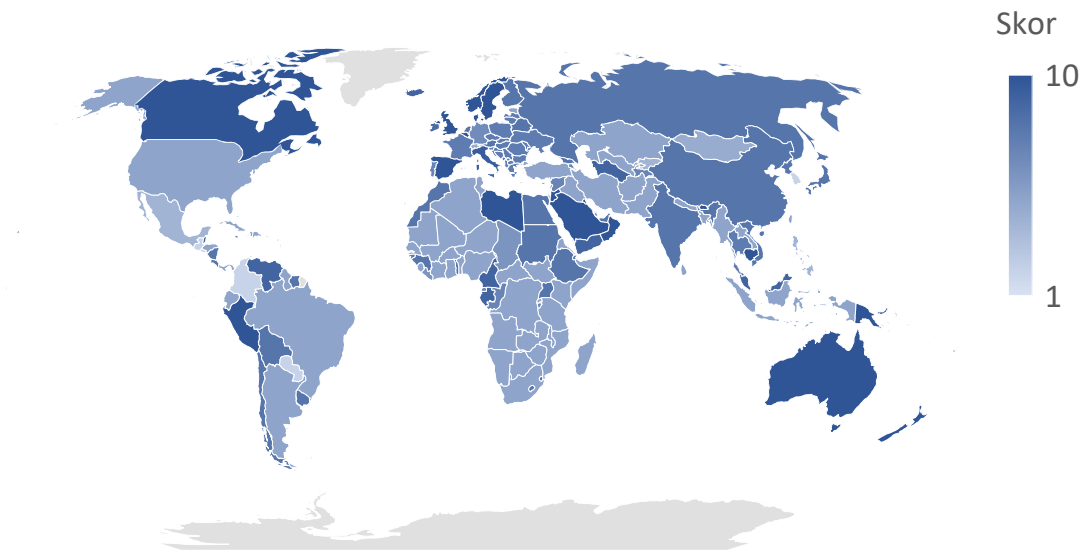
Pola Durasi Masa Jabatan Kepala Pemerintahan Menurut Sistem Tata Negara



Temuan #8: negara dengan sistem republik presidensial cenderung membatasi masa jabatan kepala pemerintahannya paling lama dua periode dengan durasi 4-5 tahun per periode. Indonesia adalah salah satunya.

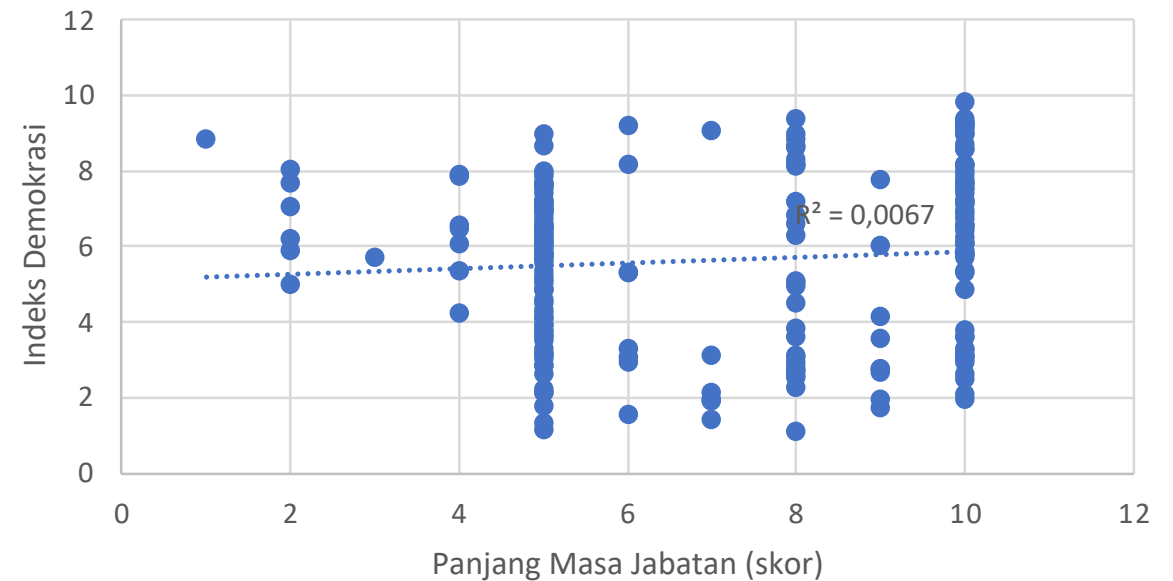
Temuan 9A: tren pembatasan masa jabatan kepala pemerintahan cenderung mempunyai hubungan korelasi yang rendah dengan indeks pembangunan demokrasi (2020) di 199 negara.

Pola Sebaran Panjang Masa Jabatan Kepala Pemerintahan

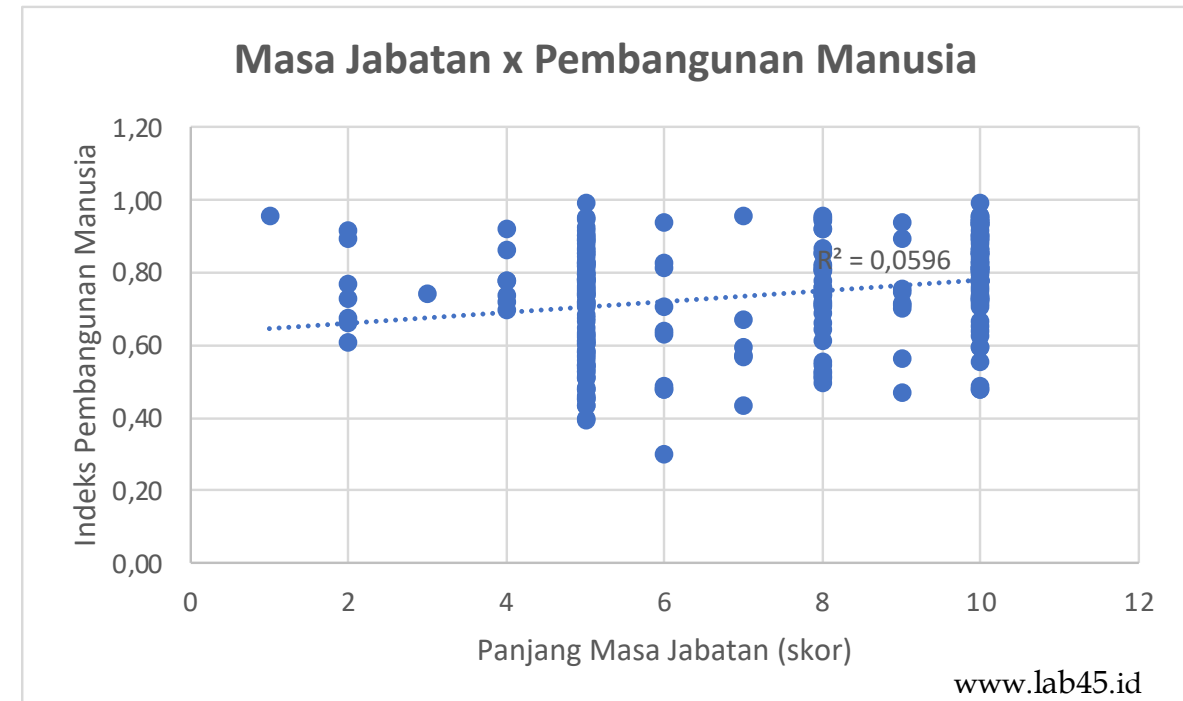
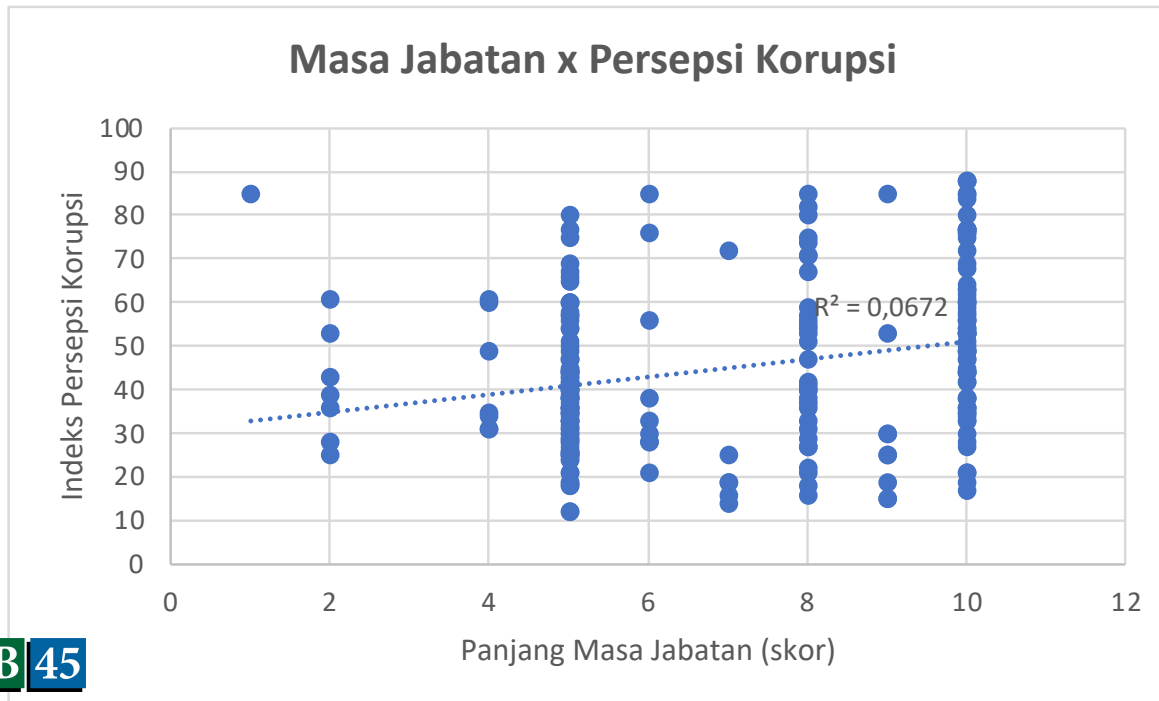
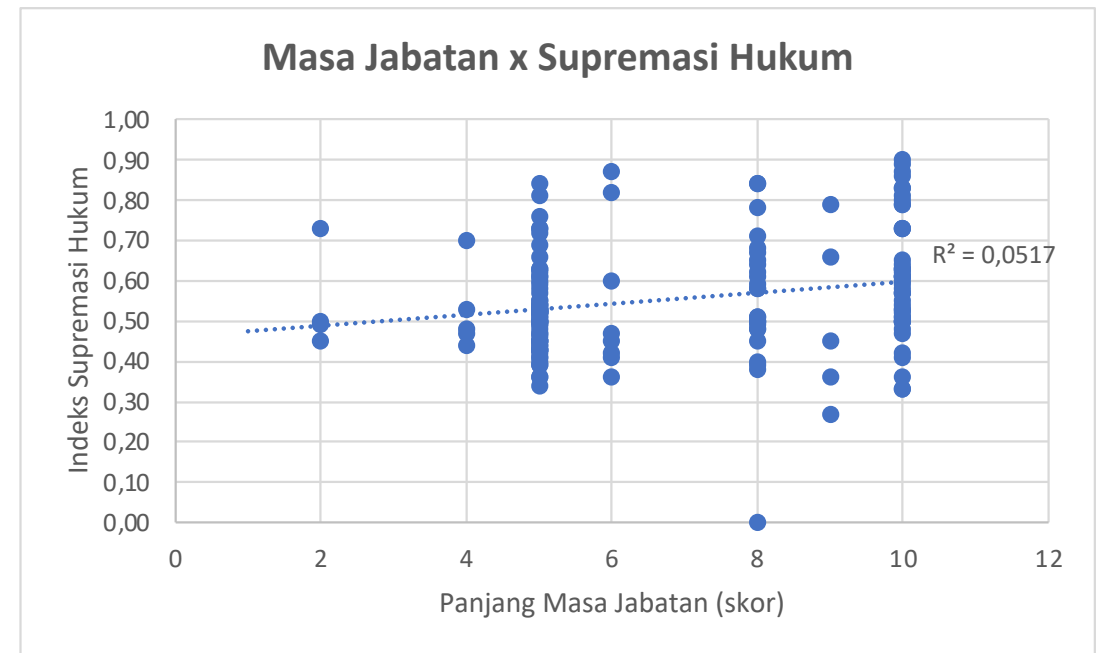


Powered by Bing
© Australian Bureau of Statistics, GeoNames, Microsoft, Navinfo, TomTom, Wikipedia

Masa Jabatan x Pembangunan Demokrasi



Temuan #9B: tren pembatasan masa jabatan kepala pemerintahan cenderung mempunyai hubungan korelasi yang rendah dengan indeks persepsi korupsi (2020), pembangunan manusia (2020), dan supremasi hukum (2020) di 199 negara.



Temuan #9C: tren pembatasan masa jabatan kepala pemerintahan cenderung mempunyai hubungan korelasi yang rendah dengan indeks kebebasan ekonomi (2021), kebebasan pers (2021), dan ketimpangan gender (2019) di 199 negara.

